

Nama Kepala Badan Otorita IKN Diumumkan Selambatnya April 2022

JAKARTA (IM) - Nama Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan diumumkan selambat-lambatnya April 2022, setelah aturan turunan yang menjelaskan soal pemerintahan administrasi khusus itu terbit. Demikian dikatakan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy.

Wandy memperkirakan pengumuman nama Kepala Badan Otorita IKN Nusantara bisa jadi pada Maret atau April 2022.

"Kalau engga (diumumkan) berbarengan, (bisa diumumkan) setelah Peraturan Presiden (Perpres) soal Badan Otorita terbit," ujar Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong, Jumat (18/2).

"Benar sekitar Maret atau April (bisa diumumkan)," katanya.

Wandy menjelaskan bahwa jabatan Kepala Badan Otorita IKN kedudukannya

setara dengan menteri. Sehingga mekanisme pemilihannya oleh Presiden Joko Widodo juga sama dengan saat memilih menteri.

"Karena ini jabatan setingkat menteri, jadi seperti biasanya pemilihan menteri. Tapi tentu presiden akan menerima masukan dari berbagai pihak," katanya menambahkan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah resmi menandatangani Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN) Nomor 3 Tahun 2022. Usai diteken presiden, KSP segera menyelesaikan berbagai aturan turunan dari UU IKN.

Adapun aturan turunan tersebut terdiri dari Peraturan Presiden (Perpres), Keputusan Presiden (Keppres), Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Kepala Badan Otorita IKN. Aturan-aturan turunan itu rencananya dapat selesai pada Maret-April 2022. ● **han**

2 | Polhukam

FOTO: ANT



DPR TETAPKAN ANGGOTA KPU DAN ANGGOTA BAWASLU 2022-2027

Anggota KPU 2022-2027 terpilih (dari kiri) August Mellaz, Idham Holik, Hasyim Asy'ari, Betty Epsilon Idroos, Mochammad Afidun, Parsadaan Harahap dan Yulianto Sudrajat berfoto bersama Ketua DPR Ketua DPR Puan Maharani (tengah) dan Wakil Ketua DPR (dari kiri) Rahmad Gobel, Lodewijk F Paulus, Sufmi Dasco Ahmad dan Muhaimin Iskandar saat Rapat Paripurna DPR ke-16 Masa Persidangan III Tahun 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (18/2). Dalam rapat Paripurna tersebut DPR menetapkan tujuh Anggota KPU dan lima Anggota Bawaslu 2022-2027.

Sah, Presiden Teken UU IKN, Pembangunan Kota Nusantara Tunggu Aturan Turunan

Pembangunan Ibu Kota Negara yang bernama Nusantara itu baru bisa dimulai setelah muncul peraturan turunan dari UU yang telah ditandatangani Presiden Jokowi.

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menandatangani Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). UU tersebut diteken Jokowi pada 15 Februari 2022.

"Iya (sudah ditandatangani) UU No 3/2022 tentang IKN," ujar Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wendy Tuturoong kepada wartawan, Jumat (18/2).

Wendy mengatakan, pemerintah telah ditandatangani UU IKN diketahuinya melalui keterangan lisan. Dirinya memastikan bahwa

UU IKN nantinya akan segera dipublikasikan.

"Mestinya sih segera ya," kata Wendy.

Wendy mengungkapkan, nantinya pembangunan Ibu Kota Negara yang bernama Nusantara itu baru bisa dimulai setelah muncul peraturan turunan dari UU yang telah ditandatangani itu.

"Tunggu peraturan turunannya, seperti Perpres tentang Otorita IKN, Keppres Kepala Otorita nya, Perpres tentang Rencana Induk dan lain-lain. Targetnya Maret-April ini bisa selesai," kata Wendy.

Tambah Prajurit

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan, akan menambah prajurit di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur sebanyak 30.000 - 50.000 orang. Nantinya, para prajurit baru akan bertugas di Kodam, Lanud, hingga Lanal baru.

Namun, dirinya akan terlebih dulu berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto terkait hal tersebut.

"Berkoordinasi kepada Menteri Pertahanan karena dia yang memiliki kewenangan pembangunan kekuatan, antara 30 hingga 50 ribu personel baru, darat, laut, udara. Di luar kekuatan TNI saat ini," kata Andika, Kamis (17/2).

Lebih jauh disampaikan, dengan adanya alokasi puluhan ribu prajurit itu bukan berarti akan merekrut prajurit baru. Melainkan diambil dari beberapa prajurit yang pernah bertugas di seluruh wilayah Indonesia.

Sedangkan untuk para prajurit yang akan menjadi pengganti itu melalui sistem rekrutmen baru.

"Penambahan yang kami

maksud itu bukan berarti kita yang baru masuk. Kita akan ambil dari seluruh satuan di seluruh Indonesia, darat laut udara. Penggantinya itulah yang kita ambil dari rekrutmen-rekrutmen baru," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Andika menuturkan, akan membangun markas baru di kawasan IKN Nusantara, Kalimantan Timur bagi tiga matra. TNI AD memiliki kebutuhan tanah 800 hektare, TNI AU 2.700 hektare, dan TNI AL 1.300 hektare.

Sehingga jika diakumulasi, luas total tanah yang dibutuhkan TNI untuk pembangunan markas mencapai 4.500 hektare. Luas tanah sebesar itu disebutkan Jenderal Andika untuk membangun Komando Daerah Militer (Kodam) baru, Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud), Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal), serta tiap-tiap perangkatnya.

"Untuk menghadirkan Kodam baru dan seperangkatnya. Untuk Angkatan Udara tadi seperangkat termasuk Lanud. Kemudian, Angkatan Laut di situ ada Armada, Pangkalan Angkatan Laut, itu kira-kira total semuanya darat, laut udara itu 4.500an hektare," ujarnya. ● **mar**

KPK Telusuri Aliran Uang Panas Rahmat Effendi untuk Berbagai Kegiatan

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri aliran uang 'panas' dugaan suap Wali Kota Bekasi nonaktif, Rahman Effendi, yang diduga digunakan untuk berbagai kegiatan.

Untuk mengungkap hal ini, penyidik KPK pun memeriksa Ketua Panitia Pembangunan Mesjid Ar Ryasakha, Widodo Indriyanto, sebagai saksi, pada Kamis (17/2) kemarin.

"Widodo Indriyanto (Pensiunan ASN/ Ketua Panitia Pembangunan Mesjid Ar Ryasakha), yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi lebih jauh mengenai aliran uang tersangka RE ke beberapa kegiatan di Kota Bekasi," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Jumat (18/2).

Selain menelusuri aliran uang panas Rahmat Effendi yang diduga digunakan untuk berbagai kegiatan, penyidik juga sedang mendalami pemotongan penghasilan pokok para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Bekasi. Diduga, Rahmat Effendi kerap memotong uang para ASN di Bekasi untuk kebutuhannya.

Dugaan pemotongan uang para ASN itu dilakukan penyidik lewat dua Staf pada Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Syarif dan Sau Mulya, pada Kamis (17/2).

"Keduanya hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait uang-uang yang dipotong dari penghasilan pokok sebagai ASN di Pemkot Bekasi yang diduga diperuntukkan bagi tersangka RE," jelas Ali.

Terkait kasus ini, penyidik KPK telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi. Kelima tersangka yang berstatus sebagai penerima suap yakni, Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi alias Bang Pepen.

Kemudian, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP, M Buyamin; Lurah Kati Sari, Mulyadi; Camat Jatisampurna, Wahyudin; serta Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertahanan Kota Bekasi, Jumhana Lutfi.

Sementara itu, empat tersangka pemberi suap yakni, Direktur PT MAM Energindo, Ali Amril; pihak swasta Lai Bui Min; Direktur Kota Bintang Rayatri, Suryadi, serta Camat Rawalumbu, Saifudin.

Dalam perkara ini, Bang Pepen diduga telah menerima uang dengan nilai total

sebesar Rp7,1 miliar terkait proyek ganti rugi pembebasan lahan di Kota Bekasi. Adapun, sejumlah proyek tersebut yakni terkait ganti rugi pembebasan lahan sekolah di wilayah Rawalumbu senilai Rp21,8 miliar.

Kemudian, pembebasan lahan Polder 202 senilai Rp25,8 miliar. Selanjutnya, proyek pembebasan lahan Polder Air Kranji senilai Rp21,8 miliar; serta proyek pembangunan gedung teknis bersama senilai Rp15 miliar. Bang Pepen diduga meminta komitmen fee kepada para pihak yang lahannya akan diganti rugi untuk proyek pengadaan barang dan jasa.

Rahmat Effendi disebut meminta uang ke para pemilik lahan dengan menggunakan modus 'Sumbangan Masjid'. Uang sebesar Rp7,1 miliar tersebut diduga diterima Bang Pepen melalui berbagai pihak perantara.

Selain itu, Rahmat Effendi juga diduga menerima sejumlah uang dari beberapa pegawai pada Pemkot Bekasi sebagai pemotongan terkait posisi jabatan yang diembannya. Bang Pepen juga diduga menerima suap terkait penguasaan proyek dan tenaga kerja kontrak di Pemkot Bekasi. ● **han**



FOTO: ANT

PEMERIKSAAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NONAKTIF

Bupati Penajam Paser Utara nonaktif Abdul Gafur Mas'ud (kanan) berjalan keluar ruangan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (18/2). Penyidik KPK melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Abdul Gafur Mas'ud dalam kasus tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa serta penyerahan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur tahun 2021-2022.

KPK Telusuri Dugaan Keterlibatan Aliza Gunado dalam Kasus Azis

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempelajari putusan atas kasus penanganan perkara di KPK yang menjerat Azis Syamsuddin untuk melihat dugaan keterlibatan politisi Partai Golkar Aliza Gunado.

Dalam kasus ini, Azis divonis 3 tahun dan 6 bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta setelah dinyatakan bersalah melakukan suap kepada eks penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan pengacara Maskur Husain.

Suap itu disebut diberikan Azis bersama Aliza Gunado agar tidak terseret kasus dugaan suap Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kabupaten Lampung Tengah yang sedang ditangani KPK.

"Kami akan pelajari lebih dahulu seluruh pertimbangan majelis hakim," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Jumat (18/2).

"Sepanjang kemudian fakta hukum tersebut berdasarkan kecukupan bukti ada keterlibatan pihak lain, siapapun itu, kami pastikan akan ditetapkan juga sebagai tersangka," imbuhnya.

Dalam sidang putusan kasus Azis, majelis hakim memutuskan untuk mengesampingkan kesaksian Aliza Gunado. Adapun keterangan Aliza yang dikesampingkan hakim adalah dinyatakan tidak menerima commitment fee terkait pengurusan DAK Kabupaten Lampung Tengah. "Hakim berpendapat keterangan Aliza Gunado berdiri sendiri tanpa didukung alat bukti lain," kata hakim ketua Muhammad Damis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (17/2).

Dalam persidangan 3 Januari 2022 Aliza dikonfirmasi dengan tiga pihak dari Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yaitu Taufik Rahman, Aan Riyanto, dan Darius Hartawan. ● **mei**

KPK Didesak Ajukan Banding atas Vonis 3,5 Tahun Azis Syamsuddin

JAKARTA (IM) - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengajukan banding atas vonis mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.

Seperti diketahui Azis divonis pidana penjara 3 tahun dan 6 bulan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (17/2). Ia dinyatakan bersalah memberi suap pada eks penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan rekannya Maskur Husain.

"Dengan ringannya vonis Azis, ICW mendesak agar Firli Bahuri segera memintahkan jaksa penuntut umum (JPU) mengajukan proses banding," tutur peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Jumat (18/2).

Kurnia menilai Azis mestinya divonis lebih tinggi karena dua alasan. Pertama, tindakan korupsi dilakukan saat ia menjadi pejabat publik. Azis diketahui merupakan mantan Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar.

"Kedua, menyuap aparat penegak hukum, terlebih uang itu digunakan untuk

mempengaruhi suatu proses hukum," paparnya.

Di sisi lain, Kurnia melihat adanya permasalahan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor terkait pemberian suap. Ia menjelaskan dalam UU Tipikor ancaman pidana pada pemberi suap rendah. Kecuali suap itu diberikan pada hakim.

"Misalnya Pasal 5 Ayat (1) UU Tipikor hukuman maksimalnya hanya 5 tahun penjara, atau Pasal 13 UU Tipikor yang hukuman maksimalnya hanya 3 tahun penjara," kata Kurnia.

"Jika UU ini direvisi, kelak orang-orang seperti Azis bisa dihukum lebih berat misalnya 15 tahun penjara," ujarnya.

Diketahui Azis dinyatakan terbukti memberi suap senilai total Rp 3,6 miliar untuk Robin dan Maskur. Majelis hakim mengatakan suap itu diberikan agar Azis dan rekannya Aliza Gunado tidak terseret dalam dugaan perkara korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Lampung Tengah yang diselidiki KPK. ● **mei**



FOTO: ANT

PEMBAYARAN KOMPENSASI KORBAN TERORISME DI BALI

Anggota Komisi III DPR I Wayan Sudirta (tengah) bersama Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo (kiri) menyerahkan kompensasi kepada korban peristiwa terorisme di Denpasar, Bali, Jumat (18/2). LPSK membayarkan kompensasi bagi 43 korban dari sejumlah peristiwa terorisme masa lalu seperti Bom Bali I dan Bom Bali II yang berdomisili di Bali dengan nilai total sekitar Rp6,1 miliar.

Kesaksian Baby Sitter Vanessa Angel Justru Ringankan Dakwaan Joddy

JOMBANG (IM) - Pengadilan Negeri Jombang, Jawa Timur kembali menggelar sidang terhadap Tubagus Joddy, pengemudi mobil yang menewaskan Vanessa Angel dan suaminya, saat terjadi kecelakaan di ruas jalan Tol Kabupaten Jombang, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

Dalam sidang keempat ini, jaksa menghadirkan dua orang saksi, di antaranya adalah tim ahli dari perusahaan mobil yang dikendarai Vanessa dan Siska Lorensa, baby sitter Gala Sky yang turut menjadi korban. Siska mengikuti sidang secara virtual dari Jakarta yang tersambung langsung dengan persidangan. Siska mengatakan, mobil Mitsubishi Pajero sport yang ditempanya bersama Vanessa, Bibi Ardiansyah dan Gala Sky sempat berganti sopir.

"Saya duduk di belakang sopir, ada Ibu Vanessa dan saya juga bayi Gala," ujar Siska saat ditanyakan Hakim.

Lebih lanjut Siska mengatakan, di tengah perjalanan, rombongan Vanessa ini berhenti dua kali di rest area tol Jakarta-Surabaya. Namun dia tidak ingat lokasi pastinya rest area tersebut.

Saat itu, mobil yang awalnya dikendarai Joddy, kemudian dibawa oleh Bibi. Suami Vanessa ini mengemudi mobil hingga berhenti di rest area kedua sekitar pukul 11.00 WIB.

"Jadi di rest area pertama sopir diganti oleh bapak (Bibi) sampai di rest area kedua itu masih disopir oleh bapak. Joddy ngantuk sehingga diganti oleh bapak," sambungnya.

Rombongan pun kembali melanjutkan perjalanan menuju Surabaya. Namun 30 menit kemudian, Bibi menepikan mobilnya di bawah flyover tol. Dia meminta Joddy untuk menggantikannya menyetir

mobil.

"Ganti sopir di bawah jembatan, diganti oleh Joddy karena bapak ngantuk, tidak masuk ke rest area," tutup Siska.

Sementara itu, kuasa hukum Joddy, Muhammad Sisworo menegaskan, tidak ada unsur kesengajaan dalam kecelakaan tersebut.

"Yang jelas sidang hari ini, pertama yang beredar, bahwa kecepatan tinggi dan yang kedua tidak terjadi pengereman, kan juga belum bisa dijelaskan. Dan yang ketiga hubungan kekeluargaan antara terdakwa dan keluarga korban baik-baik saja. Oleh karena itu, kecelakaan ini tidak ada unsur kesengajaan," tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, artis Vanessa Angel dan suaminya Febri Ardiansyah mengalami kecelakaan tunggal di KM 672 Tol Jombang, Jatim pada Kamis (4/11) sekitar pukul 12.36 WIB. Dalam kecelakaan ini, Vanessa dan Febri atau akrab dipanggil Bibi meninggal dunia di tempat.

Sementara tiga orang lain, termasuk anak mereka, baby-sitter, serta sopir mengalami luka-luka.

Dari hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), mobil Mitsubishi Pajero Nopol B 1284 BJU yang ditumpangi Vanessa dan keluarganya mengalami menabrak pembatas jalan berupa beton. Akibatnya, SUV tersebut terlempar ke jalur cepat sejauh 30 meter.

Tubagus Joddy kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara kasus tersebut pada Rabu (10/11) lalu. Setelah ditetapkan tersangka, Joddy dibawa di Rutan Polres Jombang pada Kamis (11/11) malam. ● **han**